

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	25
BAB II GRATIFIKASI DALAM TINJAUAN TINDAK PIDANA	
 KORUPSI	
A. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	34
1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara ..	34
2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"	34
3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"	38
4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"	39
5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"	37
B. Tindak Pidana Gratifikasi	40
1. Pengertian Gratifikasi	40
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Gratifikasi	41
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi	45
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	46

2. Menerima Gratifikasi	47
3. Yang Berhubungan Dengan Jabatan dan Berlawanan Dengan Kewajiban atau Tugasnya.....	47
4. Penerima Gratifikasi Tersebut Tidak Dilaporkan Kepada KPK Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diterimanya Gratifikasi.....	48
D. Konsep Melawan Hukum	49
E. Penyalahgunaan Wewenang	52

BAB III PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Landasan Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	59
1. Landasan Filosofis	59
2. Landasan Sosiologis.....	60
3. Landasan Yuridis	62
B. Latar Belakang Munculnya Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Dalam Undang-Undang Tipikor	64
C. Perkara Gratifikasi Inatura.....	67
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	69
1. Tujuan Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi	69
2. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi.....	72

BAB IV	ANALISIS GRATIFIKASI DALAM BENTUK INATURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A.	Tinjauan mengenai Gratifikasi Dalam Bentuk Inatura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	74
B.	Penerapan Sanksi Terhadap Orang Yang Melakukan Gratifikasi Dalam Bentuk Inatura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	88
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	